

Naik Peringkatkah Kita?

Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan peringkat untuk soal laporan pertanggungjawaban keuangan. Kalbar mendapat penilaian Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Ini diungkapkan oleh Gubernur Cornelis saat menghadiri rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di DPRD.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya. Sejumlah fraksi di DPRD Kalbar menyoroti persolan asset yang belum tertata dengan baik selama ini. Desakan pembentukan pansus asset terus dilontarkan. Gubernur Cornelis sebagai perwakilan pemerintah provinsi tidak mau jelas tak mau disalahkan.

Kalbar, Cornelis kepada sejumlah wartawan usai pariwisata Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi menegaskan hasil audit BPK itu nantinya akan diserahkan kepada DPRD. Dengan nada satire orang nomor satu di Kalbar ini justru menyindir pihak lain yang menuding lemahnya kinerja eksekutif.

Gubernur Cornelis menyatakan, pada masa kepemimpinannya semua asset sudah tercatat dengan baik. Bahkan, di masa kepemimpinannya, semua asset dicatat. Menurutnya, pada masa pemerintahan dia, Pemprov Kalbar mengalami peningkatan. "Pemprov mendapatkan penilaian disclaimer opinion," tegas Cornelis.

Lontaran kalangan legislative dan Statemen Gubernur untuk pengelolaan asset Pemprov merupakan dinamika demokrasi yang tengah tersaji saat ini. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, legislative tentu berada pada pijakan yang benar ketika melontarkan kecurigaan terhadap pengelolaan asset Pemprov. Di sisi lain, jawaban yang diberikan Gubernur kepada publik juga bukan suatu yang mengada-ada. Tanpa dukungan data dan fakta yang sah tentu Gubernur Cornelis tak akan 'sembarang bunyi'.

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI tentu merupakan suatu hasil obyektif dan terukur dari sebuah laporan yang dibuat Pemprov terhadap pengelolaan asetnya. Di sisi lain, semangat kritis yang diusung kalangan dewan juga bukan sesuatu yang memalukan untuk disuarakan.

Kita melihat kedua unsur pemerintahan sudah memainkan dan memerankan fungsi dan posisinya secara proporsional. Sebagai warga biasa kita hanya bisa berharap, dinamika politik yang tengah dimainkan oleh eksekutif dan legislative saat ini diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kalbar. Bukan untuk menekankan ego, sentimen dan kepentingan kelompok masing-masing. Semoga.